

Memetakan Pola Penguatan Ekonomi untuk Masyarakat dalam Kemiskinan Ekstrem Pasca Pandemi di Kabupaten Wonosobo

M. Elfan Kaukab

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sains Al-Quran, Wonosobo, Indonesia

Email: elfan@unsiq.ac.id

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk menentukan pola penguatan ekonomi yang sesuai dengan kondisi geografis dan topo grafis wilayah Kabupaten Wonosobo.

Metode – Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus, yaitu menggambarkan kondisi suatu wilayah dengan memberikan deskripsi pada suatu kasus tertentu dalam hal ini adalah kasus kemiskinan dan bagaimana pola penguatan perekonomian di era *new normal*.

Hasil – beberapa pola dapat diterapkan dalam penguatan perekonomian yang ada di Kabupaten Wonosobo yaitu peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, pengembangan kewirausahaan, dan pengembangan kemitraan.

Implikasi – bermanfaat sebagai panduan untuk penentuan kebijakan dalam memolakan pendampingan penguatan perekonomian pasca pandemi.

Kata kunci: penguatan ekonomi, kemiskinan ekstrem, Kabupaten Wonosobo, Era *New Normal*

Latar Belakang

Kondisi perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang tidak stabil dikala pemerintah sedang berupaya untuk mengoptimalkan kondisi perekonomian di Indonesia, pandemi datang dengan segala dampak negatifnya. Seperti yang diketahui sekarang bahwa dampak dari pandemi ini sangat berpengaruh terhadap segala aspek terutama pada kondisi kesehatan dan perekonomian masyarakat. Dengan adanya pandemi Covid-19 tidak dapat dipungkiri bahwa perekonomian masyarakat Indonesia saat ini sedang berada dalam kondisi yang tidak stabil.

Pada masa pandemi banyak sekali dampak negatif yang dirasakan, banyak para pekerja yang di PHK oleh perusahaan, banyak juga pekerjaan formal dan informal yang merasakan dampak dari pandemi ini seperti guru, dokter, karyawan RS, para pedagang, buruh, petani, dan yang lainnya yang menjadikan banyaknya pengangguran, kurangnya pemasukan, bangkrutnya para pengusaha, dan yang lebih prihatin adanya menutup perusahaannya. Perusahaan perlu waktu mencari lagi pegawai baru untuk memulai usahanya kembali, banyak perusahaan atau pedagang yang tidak mampu bertahan selama pandemi. Saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Perlambatan ekonomi pasti akan berdampak pada kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022. Pandemi menimbulkan efek domino dari kesehatan ke masalah sosial dan ekonomi.

New normal atau hidup damai dengan Covid-19 sebagaimana yang dipopulerkan oleh Presiden Joko Widodo, adalah hidup dengan tetap melakukan berbagai aktivitas sosialekonomi, walau menerapkan beberapa protokol tindakan untuk meminimalisir risiko penularan. Ini artinya adalah perubahan pada rutinitas dan pola kebiasaan dalam berbagai aktivitas sosial, mulai dari cara bepergian, bekerja, belajar hingga belanja. Berbagai instansi pemerintah yang terkait dengan *new normal* sudah juga mengeluarkan berbagai protokol terkait *new normal* ini.

Seperti misalnya protokol tentang pendidikan, protokol untuk aktivitas industri serta protokol *new normal* untuk industri, pendidikan, dan transportasi.

Sudah barang tentu, penerapan *new normal* memiliki risiko. Pengalaman beberapa negara seperti Korea Selatan yang sudah menerapkannya lebih dahulu pada 6 Mei 2020, menunjukkan bahwa relaksasi pembatasan sosial melalui *New normal* berpotensi menyebabkan munculnya gelombang kedua (*second wave*) penyebaran virus Covid-19. Satu hal yang telah terjadi di negara tersebut sehingga menyebabkan diberlakukannya lagi pembatasan sosial dan karantina hingga 14 Juni 2020. Padahal negara ini termasuk memiliki disiplin tinggi dalam menerapkan protokol *new normal*, dengan fasilitas dan infrastruktur kesehatan untuk *testing, tracing, dan treating* yang jauh lebih baik dari banyak negara lain.

Tatanan kehidupan baru atau *new normal* menjadi wacana yang digulirkan pemerintah untuk memulihkan produktivitas masyarakat dan membuat kondisi perekonomian kembali bergairah. *New normal* merupakan salah satu opsi untuk menjadi tonggak kebangkitan ekonomi Indonesia. Persiapan jelang *new normal* ditandai dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/335/2020 tentang Sektor Jasa dan Perdagangan (Area Publik) dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha. Dalam SE tersebut, diatur protokol kesehatan bagi pengelola tempat kerja, pelaku usaha, serta pekerja. Dokumen tersebut menjadi acuan bagi sektor usaha saat kembali menjalankan bisnis dengan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. *New normal* ditempuh pemerintah untuk menyelamatkan kondisi perekonomian negara, serta menekan risiko PHK karyawan oleh pelaku industri. Opsi *new normal* yang kemungkinan besar akan dipilih Pemerintah RI diprediksi dapat menyelamatkan kondisi perekonomian nasional. Selama masa pandemi COVID-19, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat anjlok, meskipun pada 2021 pertumbuhan ekonomi masih positif di level 3,7% (ekonomi.bisnis.com).

Belakangan ini, perhatian dan komitmen pemerintah dalam menangani kemiskinan ekstrem di masa pandemi Covid-19 demikian besar. Pemerintah memasang target penurunan angka kemiskinan ekstrim secara nasional hingga nol persen pada akhir tahun 2024. Anggaran pun digelontorkan untuk penyelesaian kemiskinan ekstrim di tahun anggaran 2021 ini hingga mencapai Rp 440,69 triliun (detik.com). Kemiskinan merupakan gambaran dari sebuah fenomena dan permasalahan sosial yang terjadi di masyarakat, dengan bentuk yang kompleks dan multidimensional. Realitas menunjukkan bahwa masyarakat yang hidup digaris kemiskinan dapat dipastikan tidak memiliki sarana sebagai salah satu penunjang kesejahteraan dan kebahagiaan. Sarana memang bukan segalanya, namun segalanya memerlukan sarana dalam rangka mencapai kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan tersebut, maka diperlukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat miskin, sehingga mampu mandiri dalam menunjang kesejahteraan hidup (Kaukab, 2020).

Mewujudkan target penurunan penduduk miskin ekstrem bukanlah perkara mudah. Selain dibutuhkan validasi dan pemutakhiran data keluarga miskin ekstrim untuk mencegah intervensi program tidak salah sasaran, yang tak kalah penting adalah bagaimana pemerintah mampu memilih program penanggulangan kemiskinan yang tepat dan efektif. Kondisi kemiskinan ekstrim itu sendiri adalah kemiskinan yang mengikuti standar global yang dibuat oleh Bank Dunia. Menggunakan estimasi konsumsi atau keseimbangan kemampuan berbelanja yang dikonversi ke dalam dolar AS *Purchasing Power Parity* (PPP), Bank Dunia menetapkan dua set batasan kemiskinan internasional, yakni 1,90 dolar AS PPP sebagai batas *extreme poverty* dan 3,20 dolar AS PPP sebagai batas *poverty*. Angka konversi PPP menunjukkan banyaknya rupiah yang dikeluarkan untuk membeli sejumlah kebutuhan barang dan jasa dengan jumlah yang sama, dibandingkan dengan barang dan jasa yang dapat dibeli dengan harga satu dolar AS. Pada 2021 diperkirakan 1,90 dolar AS PPP setara dengan Rp 11.941,10. Hal tersebut berdasarkan estimasi konversi dolar AS PPP pada 2017 yang digerakkan dengan perubahan

Indeks Harga Konsumen (IHK) periode Maret 2017 - Maret 2021. Pada 2017 sebesar 1,90 dolar AS PPP setara dengan Rp 10.195,60 (berdasarkan data terakhir Bank Dunia).

Selain itu, ciri penduduk miskin ekstrim biasanya tak memiliki aset produksi sendiri, bekerja dengan upah rendah, dan tidak memiliki tabungan sebagai penyangga ekonomi keluarga. Chambers (1987) dalam Suyanto (2020) menyebut ciri utama penduduk miskin ekstrem adalah rentan atau rapuh. Tidak dimilikinya tabungan yang cukup dan tanggungan utang relatif besar adalah kombinasi tekanan sosial yang menyebabkan penduduk miskin masuk dalam perangkap kemiskinan yang makin lama makin tidak memungkinkan mereka untuk keluar secara mandiri.

Permasalahan sosial ekonomi karena pandemi sangat kompleks. Pemerintah baik ditingkat nasional sampai daerah harus ikut andil besar untuk segera melakukan terobosan penguatan perekonomian untuk mempercepat stabilitas dengan program-program dan kebijakan yang mengarah pada pemulihan ekonomi. Ditingkat paling bawah yaitu masyarakat dengan kemiskinan ekstrim mengalami keterpurukan kemampuan daya beli yang sangat tajam. Hal ini tentu membutuhkan campur tangan yang serius dari pemerintah agar kondisi ini tidak semakin memperburuk kehidupan baik sosial maupun ekonomi.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif studi kasus yaitu sebuah penelitian yang berdasar kepada kejadian yang sudah terjadi. Penelitian ini mempelajari interaksi antar variabel satu dengan lainnya. Tujuan penelitian ini untuk mempelajari bagaimana suatu kejadian bisa terjadi secara sistematis pada kurun waktu yang cukup lama. Studi kasus merupakan jenis penelitian kualitatif yang dilakukan dengan sebuah program, kegiatan, peristiwa, dan kelompok dalam keadaan tertentu. Penelitian ini secara kasar digunakan untuk mengamati latar belakang, keadaan, dan interaksi yang terjadi. Amatan yang dilakukan yaitu terkait pola penguatan perekonomian masyarakat Kabupaten Wonosobo yang memasuki era *new normal* pasca pandemi.

Tingkat Kemiskinan di Wonosobo

Kemiskinan merupakan isu global yang dihadapi oleh banyak negara di dunia termasuk Indonesia. Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs), penurunan kemiskinan menjadi isu yang mendapatkan perhatian utama. Hal ini terbukti dengan penurunan kemiskinan dan kelaparan sebagai tujuan pertama dan kedua, serta dibangunnya komitmen global untuk mengakhiri kemiskinan dalam bentuk apapun. Permasalahan kemiskinan mendapat perhatian yang besar karena disadari bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensional yang erat kaitannya dengan berbagai persoalan sosial, ekonomi, keamanan, politik, dan lain-lain. Hingga saat ini, permasalahan kemiskinan masih menjadi salah satu agenda utama yang harus diatasi oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Upaya serius pemerintah untuk mengatasi kemiskinan sudah dimulai sejak era orde baru hingga saat ini. Berbagai strategi pengentasan kemiskinan sudah dijalankan pemerintah Indonesia, dari level pemerintah pusat hingga level pemerintah daerah.

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi salah satu masalah besar. Pemerintah baik pusat maupun daerah telah berupaya dalam melaksanakan berbagai kebijakan dan program-program penanggulangan kemiskinan namun dirasa masih belum optimal. Salah satu aspek yang menjadi peranan penting dalam penanggulangan kemiskinan tepat sasaran adalah tersedianya data kemiskinan yang akurat dan terpercaya. Pengukuran yang dipercaya dapat menjadi elemen penting dalam pengambilan kebijakan terhadap kondisi hidup orang miskin. Dalam menentukan suatu wilayah desa tergolong miskin atau tidak, analisis yang digunakan biasanya masih bersifat global, artinya diberlakukan untuk semua lokasi yang diamati. Sementara

kenyataannya kondisi lokasi yang satu tidak selalu sama dengan kondisi yang lain, karena kondisi kemiskinan suatu desa sangat mungkin dipengaruhi oleh lokasi pengamatan atau kondisi geografis (*spatial variation*) desa, termasuk posisinya terhadap desa lain di sekitarnya sehingga model penentuan tingkat kemiskinan yang bersifat global tidaklah cocok digunakan karena munculnya heterogenitas spasial.

Permasalahan kemiskinan adalah salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Wonosobo. Selama 10 tahun terakhir, isu kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan mendapatkan perhatian yang besar bahkan mendapatkan prioritas pertama dalam kebijakan pengelolaan keuangan daerah (Renstra Kab. Wonosobo). Selama lebih dari 5 tahun terakhir, Kabupaten Wonosobo menduduki peringkat tiga besar kabupaten dengan persentase penduduk miskin terbanyak se-Jawa Tengah, bahkan tidak jarang tertinggi dibanding kabupaten-kabupaten lain di Jawa Tengah.

Selama 5 tahun terakhir, jumlah dan persentase penduduk miskin Wonosobo cenderung mengalami penurunan walaupun antar tahunnya berfluktuasi. Persentase penduduk miskin pada tahun 2016 adalah sebesar 20,57 persen, kemudian mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 20,32 persen. Pada tahun 2018, penduduk miskin kembali mengalami penurunan menjadi 17,58 persen, sedikit mengalami penurunan di tahun 2019 menjadi 16,63 persen dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 17,36 persen. Secara umum, selama kurun waktu tersebut, terjadi penurunan persentase penduduk miskin. Kenaikan kemiskinan pada tahun 2020 diakibatkan sebagai efek dari pandemi covid-19 yang melanda dunia termasuk Kabupaten Wonosobo. Efek dari pandemi mengakibatkan penurunan aktivitas ekonomi di berbagai bidang. Efek pandemi covid-19 dapat dilihat dari survei yang dilakukan BPS pada bulan April 2020 yang menghasilkan publikasi "Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Era *New normal*". Contoh efek pandemi, sebanyak 69,44 persen responden menyatakan selalu menghindari penggunaan transportasi umum selama pandemi sedangkan 11,68 persen kadang-kadang menghindari transportasi umum, artinya terjadi penurunan aktivitas ekonomi di bidang transportasi yang pada akhirnya akan mengurangi pendapatan orang yang bekerja di bidang transportasi. Dari responden yang mengisi survei, tercatat 11,06 persen mengalami PKH akibat perusahaan/tempat usaha dimana ia bekerja ditutup sementara bahkan permanen, sedangkan 27,43 persen bekerja namun sementara dirumahkan. Beberapa contoh pengurangan aktivitas ekonomi tersebut mengakibatkan berkurangnya pendapatan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada berkurangnya konsumsi rumah tangga (BPS, 2021).

Jika kita bandingkan angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo dan Jawa Tengah, terdapat perbedaan yang cukup jauh. Pada tahun 2016, angka kemiskinan Kabupaten Wonosobo adalah 20,53 persen sedangkan Jawa Tengah 13,27 persen, terjadi selisih 6,74 persen. Pada tahun 2020 selisihnya juga berkisar di 6 persen tepatnya 5,85 persen, mengalami penurunan selisih, artinya secara persentase pengurangan penduduk miskin di Kabupaten Wonosobo lebih cepat dibanding rata-rata Provinsi Jawa Tengah. Walaupun persentase pengurangan tersebut cukup menggembirakan, tapi tetap saja jumlah dan penduduk miskin di Wonosobo masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Wonosobo karena jumlahnya masih besar. Harapannya adalah selisih dengan angka Jawa Tengah semakin kecil atau bahkan kemiskinan Kabupaten Wonosobo di bawah kemiskinan Jawa Tengah, dan ini membutuhkan rencana serta kerja sama dari semua pihak sehingga bisa mengoptimalkan potensi Wonosobo dan pada akhirnya akan mengurangi kemiskinan di Wonosobo (BPS, 2020).

Garis Kemiskinan (GK) adalah garis yang menunjukkan nilai minimal dari suatu rumah tangga sehingga rumah tangga tersebut tidak masuk dalam kelompok rumah tangga miskin. Seseorang dalam suatu rumah tangga yang mempunyai pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan akan masuk dalam kelompok penduduk miskin. Selama 5 tahun terakhir, yaitu 2016–2020, garis kemiskinan di Kabupaten Wonosobo mengalami kenaikan fluktuatif tiap tahunnya. Artinya agar tidak masuk dalam kategori penduduk miskin, maka konsumsi

masyarakat di Kabupaten Wonosobo, secara nominal, juga harus mengalami kenaikan. Pada tahun 2016, garis kemiskinan penduduk Wonosobo adalah Rp 297.422,- per kapita per bulan. Kemudian pada tahun 2017 menjadi Rp 308.553,- atau naik 3,74 persen dibanding tahun 2016. Kemudian tahun 2018, 2019, dan 2020 naik masing-masing sebesar 4,48 persen, 5,36 persen, dan 6,41 persen. Kenaikan GK disebabkan salah satunya oleh inflasi. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan GK naik sehingga orang akan membutuhkan “pengeluaran” lebih jika ingin keluar dari kategori miskin. Itulah kenapa, sebisa mungkin inflasi perlu dikendalikan, bukan diminimalkan, pada level tertentu. Inflasi yang terlalu tinggi dan diluar batas kendali berpeluang meningkatkan jumlah penduduk miskin (BPS, 2020).

Gambar berikut adalah 25 desa yang masuk dalam kategori kemiskinan ekstrim di Kabupaten Wonosobo:



Gambar 1. Peta Kemiskinan Ekstrim di Kabupaten Wonosobo

Pola Penguatan Ekonomi

Sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang. Pembangunan diharapkan berlandaskan pada keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Sementara, dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021, diharapkan tujuan pemerataan pembangunan dapat tercapai dengan memanfaatkan kearifan lokal untuk percepatan penurunan kemiskinan dan pemulihan ekonomi nasional. Salah satu strategi penguatan program pemberdayaan masyarakat adalah dengan melakukan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari tingkat pemerintah daerah, tingkat kabupaten, hingga desa. Target dari pemutakhiran DTKS adalah integrasi bansos dan digitalisasi penyaluran, afirmasi penargetan untuk pemberdayaan masyarakat, dan perbaikan layanan dasar. Program pemberdayaan masyarakat masuk ke dalam salah satu program prioritas di bidang pengentasan kemiskinan.

Dalam buku yang diterbitkan oleh BPS (2021) yaitu Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Era *New normal* menggambarkan beberapa kondisi masyarakat Kabupaten

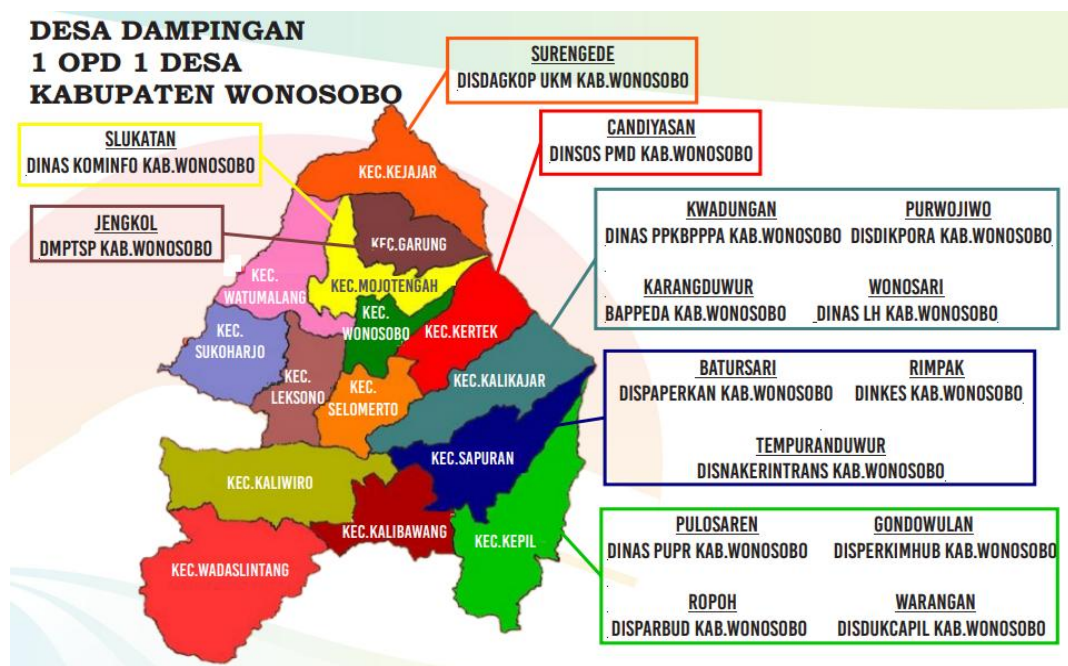
Wonosobo yang dapat digunakan sebagai pijakan penentuan pola penguatan perekonomian. Kondisi masyarakat Kabupaten Wonosobo pasca pandemic berdasarkan jawaban dari responden dari survey yang dilakukan oleh BPS tahun 2020 antara lain:

1. Pekerja/buruh yang dirumahkan karena situasi kedaruratan kesehatan masyarakat akibat wabah pandemi Covid-19 masihtetap berhak mendapatkan upah penuh atau pemotongan upah apabila telah disepakati oleh pihak perusahaan dan pekerja . Sebanyak 51,57 persen responden yang sementara dirumahkan akibat terdampak Covid-19 mengaku mengalami penurunan pendapatan.
2. Masyarakat miskin, rentan miskin, dan yang bekerja di sektor informal merupakan yang paling terdampak dari mewabahnya pandemic Covid-19. 70,15 persen responden dalam kelompok berpendapatan rendah ($\leq$ 1,8 juta) mengaku mengalami penurunan pendapatan pada Bulan Juni 2020.
3. Pandemi Covid-19 menyebabkan perbedaan pengeluaran dari kondisi biasa. 56,09 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran, 11,90 persen mengalami penurunan pengeluaran dan sisanya tetap di Bulan Juni 2020.
4. Sebanyak 50,50 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran bahan makanan selama masa Covid-19. 42,63 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran bahan makanan. Sementara 6,87 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran bahan makanan.
5. Sebanyak 33,80 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran makanan dan minuman jadi selama masa Covid19. 54,41 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran makanan dan minuman jadi. Sementara 11,79 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran bahan makanan.
6. Sebanyak 50,73 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran barang kesehatan selama masa Covid-19. 42,29 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran barang kesehatan. Sementara 6,98 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran barang kesehatan.
7. Sebanyak 40,84 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran konsumsi listrik selama masa Covid-19. 38,21 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran konsumsi listrik. Sementara 20,95 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran konsumsi listrik.
8. Sebanyak 28,60 persen responden mengalami pemingkatan pengeluaran Bahan Bakar Minyak selama masa Covid-19. 57,32 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran Bahan Bakar Minyak. Sementara 14,08 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran Bahan Bakar Minyak.
9. Sebanyak 66,09 persen responden mengalami peningkatan pengeluaran pulsa atau paket data selama masa Covid-19. 29,11 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran pulsa atau paket data. Sementara 4,80 persen sisanya mengalami penurunan pengeluaran pulsa atau paket data.
10. Sebanyak 31,62 persen responden mengalami penurunan pengeluaran jasa transportasi umum selama masa Covid-19. 51,60 persen tidak mengalami perubahan pengeluaran jasa transportasi umum Sementara 16,98 persen sisanya mengalami peningkatan pengeluaran jasa transportasi umum.
11. Anjuran pemerintah untuk tetap berada di rumah selama Pandemi Covid-19 membuat masyarakat mengubah pola belanja dengan melakukan aktivitas belanja online dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil survei menunjukkan sebanyak 31,44% responden mengalami peningkatan aktivitas belanja online selama pandemi Covid-19 pada Bulan April dibanding Maret 2020. Kemudian selama Era *New normal* peningkatan aktivitas belanja online berubah menjadi 25,09% pada Bulan Juni dibandingkan Bulan Mei 2020.

12. Dari hasil survei, 66,87 persen responden generasi milenial perempuan memilih untuk tetap tinggal di rumah dengan alasan menjaga kesehatan diri dan keluarga. Hal ini menjadikan generasi milenial perempuan lebih memilih kegiatan berbelanja online dibandingkan milenial laki-laki.

Dilihat dari hasil survey yang dilakukan pasca pandemi, terdapat perubahan pola kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Wonosobo yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan program atau kegiatan perekonomian yang disesuaikan dengan kondisi saat ini. Strategi penurunan kemiskinan yang penting selain mengurangi beban pengeluaran adalah dengan meningkatkan pendapatan seperti peningkatan akses permodalan, peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran, pengembangan keterampilan dan layanan usaha, serta pengembangan kewirausahaan, kemitraan, dan keberantaraan. Beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat yaitu pertama, masing-masing dinas terkait yang merupakan pelaksana teknis program pemberdayaan masyarakat perlu melakukan sinergi program yang berkaitan. Kedua, selain sinergi program, sinergi dalam penetapan lokasi dan pendamping juga menjadi hal yang penting. Dalam unsur penetapan lokasi dapat dilakukan melalui pendekatan kawasan yang menyasar fokus kawasan prioritas pemerintah atau di satu desa yang sama. Sementara dalam unsur pendamping dapat diidentifikasi kemudian disinergikan antar program untuk mengoptimalkan capaian program pemberdayaan di masing-masing dinas (www.kemenkopmk.go.id).

Saat ini telah dilakukan pendampingan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk desa yang mengalami kemiskinan ekstrim dalam program "1 OPD 1 Desa Dampingan" namun belum maksimal dalam pelaksanaannya. Pemerintah belum fokus dalam menanggulangi kemiskinan dengan masih berkuat pada pekerjaan rutin yang bersifat administratif.



Gambar 2. Desa Dampingan OPD Kabupaten Wonosobo

Misi Bupati tahun 2020 dijelaskan bahwa Kabupaten Wonosobo berkomitmen untuk meningkatkan perekonomian daerah yang tangguh untuk pengurangan kemiskinan yang berbasis pada bidang pertanian, pariwisata, dan koperasi. Program yang akan dijalankannya itu

menurunkan biaya produksi melalui inovasi dan penerapan teknologi ramah lingkungan, subsidi pertanian, pengembangan BUMDES dan UMKM Center, fasilitas subsidi bunga, dan revitalisasi pasar.

Pendampingan perekonomian masyarakat miskin era *new normal* tidak ada formula yang paling tepat, namun dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat sekitar (Rahma, et al., 2020). Seperti halnya masyarakat di Kabupaten Wonosobo dengan mayoritas penduduk bertani, tentu akan tepat jika pemerintah hadir dengan program-program yang focus dalam bidang pertanian. Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan ekstrim harus menjadi focus utama dalam pengentasan kemiskinan. Beberapa pola penguatan yang dapat dilakukan di Kabupaten Wonosobo antara lain:

1. Peningkatan akses permodalan
2. Peningkatan kualitas produk dan akses pemasaran
3. Pengembangan keterampilan dan layanan usaha
4. Pengembangan kewirausahaan
5. Pengembangan kemitraan

Pola di atas tentu butuh dukungan penuh dari pemerintah serta dorongan dari semua pihak terkait agar dalam pelaksanaannya jelas, terukur, dan dapat dievaluasi sehingga capaiannya jelas.

Simpulan

Dengan dimulainya fase *new normal* maka sebuah perencanaan diberbagai aspek sosial ekonomi masyarakat seyogyanya sudah tersedia. Berbagai institusi pemerintah seperti Bappenas juga menyiapkan satu Protokol Produktif Aman sebagai protocol bagi masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas sosial ekonomi di masa pandemi, yang mengacu pada kriteria badan kesehatan dunia WHO (*World Health Organization*). Akan tetapi berbagai protocol ini saja tidak cukup. Karena kehadirannya bermaksud sebatas menerapkan tindakan preventif penyebaran virus Covid-19, yang pada akhirnya bertujuan untuk menyelamatkan kehidupan dan penghidupan masyarakat, dengan mengatur pola aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan. Berbagai protocol ini serupa dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah, yang seyogyanya dikoordinasikan lintas instansi serta antar pemerintah pusat, provinsi, serta daerah. Hal ini untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kebijakan secara horizontal dan vertikal, yang kemudian akan menyebabkan kebingungan masyarakat dan ketidakefektifan dalam penerapannya.

Contoh mutakhir di mana penerapan kebijakan *new normal* menjadi kontraproduktif adalah aturan terkait keharusan mendapatkan Surat Ijin Keluar Masuk (SIKM) dalam beraktivitas di era *new normal*, yang ditetapkan beberapa pemerintah daerah. Dalam praktiknya, aturan ini menjadi beban yang memberatkan masyarakat, karena selain pengurusannya yang berbelit juga melibatkan biaya yang tidak kecil. Berlikunya jalan beraktivitas kembali di era *new normal* ini bagi pekerja antar daerah juga ditambah adanya aturan keharusan menjalani tes *polymerase chain reaction* (PCR) atau *rapid test* yang dikeluarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Sehingga tidak mengherankan banyak yang kemudian membatalkan beraktivitas, termasuk maskapai penerbangan yang pun membatalkan penerbangan. Lebih jauh, koordinasi kebijakan dan aturan lintas instansi horizontal dan vertikal juga harus dilakukan bukan hanya terbatas pada aturan yang terkait protocol *new normal*. Yang juga penting sesungguhnya adalah kebijakan dan aturan yang terkait anggaran dan penggunaan anggaran untuk stimulus bagi pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat.

Kabupaten Wonosobo melakukan *refocusing* anggaran hingga 17% untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi. Berbagai program stimulus bagi masyarakat terdampak dilakukan agar segera stabil. Tentu bukan perkara mudah dan tergesa-gesa, efek pandemi yang

merata pada semua bidang terutama dampak ekonomi membutuhkan penanganan yang terus menerus dan konsisten. Dengan adanya kerjasama semua pihak yang dikomando oleh pemerintah daerah diharapkan mampu untuk terus berinovasi dalam memberikan *trigger* penguatan ekonomi yang pada gilirannya akan mengembalikan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Wonosobo di era *new normal*.

Referensi

- BPS Kabupaten Wonosobo. (2021). Profil Masyarakat Kabupaten Wonosobo dalam Era New normal
- BPS Kabupaten Wonosobo. (2021). Kemiskinan Kabupaten Wonosobo
- Dokumen RPJMN Kabupaten Wonosobo Tahun 2021-2026
- Dokumen RKPD Kabupaten Wonosobo Tahun 2022
- Kaukab, M. E. (2020). Indonesian Economic Outlook 2020: Peluang Dari Keterbukaan. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ*, 7(1), 38-47.
- Iswari, Lenti dan Muharir. (2021). Pengaruh Covid19 terhadap Aktivitas Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia
- Permana, Maulana Taufan, Hasbi Yasin, Agus Rusgiyono. (2013). Analisis Faktor-Faktor Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo dengan Pendekatan *Geographically Weighted Regression*. *Jurnal Gaussian*. Volume 2, Nomor 1 Halaman 59-68
- Rahmah, I., Kaukab, M. E., & Yuwono, W. (2020). Peran Pemerintah dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM. *JURNAL CAPITAL: Kebijakan Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 2(2), 30-50.
- Ridwan, Mochamad. (2012). Penguatan Ekonomi Berbasis Kelompok. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*. Vo. 13 No. 2 Hal. 207-217.
- Setyowati, Fitri Andriani, dan Inaya Sari Melati. (2020). Identifikasi Faktor Penyebab Kemiskinan di Kabupaten Wonosobo Berdasarkan Klasifikasi Perkotaan dan Perdesaan. *Economic Education Analysis Journal*. Vol. 9 (3) hal. 875-891
- <https://ekonomi.bisnis.com>
- <https://news.detik.com>
- <https://radarsemarang.jawapos.com>